

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang menjadi inti problematika penelitian (Suharsimi Arikunto, 2000: 29). Obyek dalam penelitian ini adalah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sedangkan lokasi penelitian bertempat di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2005: 1). Berdasarkan tingkat eksplanasinya atau tingkat penjelasannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif. Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008: 45) *verification* adalah memeriksa benar tidaknya, apabila dilaksanakan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan, yang telah pernah dilaksanakan ditempat lain, dalam mengatasi masalah yang serupa dalam kehidupan. Proses penelitian seperti itu akan menghasilkan rumusan kesimpulan dan saran tindakan (implementasi) yang semakin baik kualitasnya untuk dipergunakan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

Sedangkan menurut metodenya, penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Menurut Kerlinger (1973) (dalam Sugiyono, 2005: 7) mengemukakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Penelitian survey pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam.

3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

3.2.2.1 Definisi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005: 32). Variabel dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menjadi objek pengamatan penelitian atau yang sering pula dikatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dua variabel yaitu:

1. Variabel independen (X).

Komaruddin Sastradipoera (2005: 187) mengatakan bahwa variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau penyebab bagi perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja. Menurut Indra Bastian (2006: 171) mengatakan bahwa "*Performance budgeting* (anggaran yang

berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada ‘*output*’ organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.”

2. Variabel dependen (Y).

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen. Keberadaan variabel dependen tergantung pada pengaruh variabel independen (Komaruddin Sastradipoera, 2005: 188). Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen (Sugiyono, 2005: 33). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Menurut Menurut Mardiasmo (2009: 21) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada penelitian ini aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diteliti tidak hanya terbatas pada akuntabilitas finansial saja, tetapi juga akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas manajemen, dan akuntabilitas program seperti yang diterangkan dalam operasionalisasi variabel.

3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel

Gambaran mengenai operasionalisasi variabel yaitu variabel X (Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja), dan variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah) dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Anggaran Berbasis Kinerja (variabel X ₁)	Sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi." (Indra Bastian 2006: 171)	a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran	1. Transparansi kegiatan yang dianggarkan 2. Akses dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran	ordinal	1,2,3,4 5,6
		b. Disiplin anggaran	1. Efisiensi belanja dan pencatatannya 2. Ketersediaan dana		7,8 9,10
		c. Keadilan anggaran	1. Keadilan pengalokasian anggaran 2. Keadilan pemberian pelayanan		11,12 13,14
		d. Efisiensi dan efektivitas anggaran	1. Efisiensi & efektivitas dalam penggunaan anggaran 2. Pemanfaatan dana anggaran		15,16, 17 18,19, 20
		e. Disusun dengan pendekatan kinerja	1. Disusun dengan pendekatan kinerja 2. Profesionalisme kerja di dalam organisasi		21,22 23,24
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (variabel Y)	Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada	a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum	1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan (<i>abuse of power</i>) 2. Adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain	Ordinal	1,2 3,4

<p>pihak-pihak yang berkepentingan. (Mardiasmo, 2009: 21)</p>	<p>b. Akuntabilitas proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur yang digunakan 2. Pelayanan publik diberikan secara responsif dan cepat. 3. Pengawasan terhadap <i>mark up</i> dan pungutan-pungutan lain 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tender 	<p>5,6</p> <p>7,8</p> <p>9,10,11</p> <p>12,13</p>
	<p>c. Akuntabilitas program</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian tujuan yang ditetapkan dan pelaksanaannya 2. Alternatif program 	<p>14,15</p> <p>16,17</p>
	<p>d. Akuntabilitas kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban Tujuan dibuatnya kebijakan 2. Pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil 	<p>18,19</p> <p>20,21</p>
	<p>e. Akuntabilitas finansial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban menggunakan dana publik 2. Penyajian Laporan Keuangan 	<p>22,23, 24,25</p> <p>26,27</p>

3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Menurut Sugiyono (2005: 72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Kota Bandung yang berjumlah 63 SKPD yang terdiri dari: 30 kecamatan, 17 dinas, 13 lembaga teknis dan 3 kantor daerah, yang terdiri dari:

Tabel 3.2
Daftar SKPD di Kota Bandung

No	Nama SKPD	No	Nama SKPD
1	Kecamatan Andir	33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Kecamatan Antapani	34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kecamatan Arcamanik	35	Dinas Kesehatan
4	Kecamatan Astanaanyar	36	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Kecamatan Babakan Ciparay	37	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
6	Kecamatan Bandung Kidul	38	Dinas Pemakaman dan Pertamanan
7	Kecamatan Bandung Kulon	39	Dinas Pemuda dan Olah Raga
8	Kecamatan Bandung Wetan	40	Dinas Pendapatan
9	Kecamatan Batununggal	41	Dinas Pendidikan
10	Kecamatan Bojongloa	42	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	Kecamatan Bojongloa Kaler	43	Dinas Perhubungan
12	Kecamatan Buah Batu	44	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13	Kecamatan Cibeunying Kaler	45	Dinas Sosial
14	Kecamatan Cibeunying Kidul	46	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
15	Kecamatan Cibiru	47	Dinas Tenaga Kerja
16	Kecamatan Cicendo	48	Badan Kepegawaian Daerah
17	Kecamatan Cidadap	49	BKPPM
18	Kecamatan Coblong	50	BPPT
19	Kecamatan Cinambo	51	BPPKB
20	Kecamatan Gedebage	52	BPLH
21	Kecamatan Kiara Condong	53	BAPPEDA
22	Kecamatan Lengkong	54	Inspektorat Kota Bandung
23	Kecamatan Mandalajati	55	Kantor Pengelolaan Pemakaman
24	Kecamatan Panyileukan	56	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
25	Kecamatan Rancasari	57	RSUD Kota Bandung
26	Kecamatan Regol	58	RSKGM
27	Kecamatan Sukajadi	59	RSKIA
28	Kecamatan Sukasari	60	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Kecamatan Sumur Bandung	61	Sekretariat Daerah
30	Kecamatan Ujung Berung	62	Sekretariat DPRD
31	Dinas Binamarga dan Pengairan	63	DPKAD (selaku SKPD)
32	Dinas Kebakaran		

Lalu dari daftar tersebut, populasi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Kelompok SKPD

No	Klasifikasi SKPD	Jumlah
1	Dinas	17
2	Lembaga Teknis	13
3	Kantor	3
4	Kecamatan	30
Total		63

3.2.3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Menurut Sugiyono (2005: 73) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dengan kata lain bahwa sampel yang diambil hendaknya mewakili populasinya (Furqon, 2009: 147). Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2005: 73). Teknik sampling yang digunakan untuk variabel anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas publik adalah *probability sampling*. Menurut Prasetyo dan Jannah (2010: 122) bahwa sampel probabilita adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jenis *probability sampling* yang dipilih adalah *proportionate stratified random sampling*. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, dan dalam

penelitian ini, penentuan sampel diambil secara acak. Dari populasi SKPD sebanyak 63 tersebut akan diambil sejumlah sampel dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Husein Umar (2008: 67)

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = presentasi kelonggaran karena ketidakpastian yang masih ditolerir 5%-10%

Menurut Slovin (dalam Husein Umar, 2008: 67) besarnya sampel SKPD yang diambil adalah:

$$n = \frac{63}{1 + 63(0,1^2)}$$

$$n = 38,65 \approx 39 \text{ SKPD}$$

Dari 39 SKPD tersebut kemudian diambil sampel secara acak sesuai dengan proporsi masing-masing dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$s = \frac{n}{N} \times S$$

Keterangan:

s = jumlah sampel setiap strata secara proporsi

S = jumlah seluruh sampel yang didapatkan

N = jumlah seluruh populasi

n = jumlah masing-masing strata populasi

Setelah dihitung menggunakan rumus di atas, maka didapatkan jumlah sampel dari setiap kelompok SKPD sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengalokasian Sampel Kelompok SKPD

No	Klasifikasi SKPD	Jumlah		
		Strata populasi	Sampel	Sampel (dibulatkan)
1	Dinas	17	10,52	11
2	Lembaga Teknis	13	8,04	8
3	Kantor	3	1,85	2
4	Kecamatan	30	18,57	18
Total		63	38,98	39

Adapun yang menjadi sasaran pengisian kuesioner adalah:

1. Kuesioner variabel X yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja akan diisi oleh kepala sub bagian keuangan di setiap SKPD karena kepala bagian keuangan yang bertugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam penjabaran APBD, di dalam DPA-SKPD akan diuraikan sasaran yang hendak dicapai, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut. Selain itu pula, kepala sub bagian keuangan yang bertanggungjawab dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dari DPA-SKPD yang berupa laporan keuangan SKPD.
2. Kuesioner variabel Y yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah akan diisi oleh kepala masing-masing SKPD karena kepala SKPD mempunyai tanggung jawab atas semua aspek dalam SKPD tersebut baik keuangan, program yang dijalankan, proses manajerial yang terlibat didalamnya, serta kebijakan yang telah digunakan. Kepala SKPD pula yang harus bertanggungjawab atas penggunaan anggaran daerah dimana hasil penggunaan

anggaran daerah tersebut tertuang dalam bentuk laporan keuangan SKPD yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2005: 129) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh peneliti melalui kuesioner.

Menurut Sugiyono (2005: 135) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Skala pengukuran yang digunakan untuk kuesioner tersebut adalah skala likert. Untuk variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X) kuesioner akan ditujukan pada kepala sub bagian keuangan tiap SKPD dan untuk variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) kuesioner akan ditujukan pada pengguna anggaran atau kepala dinas/badan/kantor.

Selain menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data melalui telaah kepustakaan. Telaah kepustakaan dilakukan dengan tujuan

untuk memperoleh dan membangun landasan teoritis, kerangka pemikiran, dan menentukan pertanyaan yang akan diajukan berdasarkan penelitian ini. Pengumpulan data melalui telaah kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber literatur dari buku-buku yang relevan, jurnal, artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini, dan internet.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Menurut Sugiyono (2005: 142) kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini, digunakan skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban-jawaban atas pernyataan tersebut kemudian diberi skor.

Tabel 3.5
Pemberian Skor Jawaban untuk Setiap Pernyataan

Pilihan Jawaban	Skor Positif	Skor Negatif
A	5	1
B	4	2
C	3	3
D	2	4
E	1	5

(Sugiyono, 2009: 94)

Menurut Sugiyono (2009), kriteria interpretasi skor berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan sebagai berikut, “skor maksimum setiap kuesioner adalah 5 dan skor minimum adalah 1, atau berkisar antara 20% sampai 100%, maka jarak antara skor yang berdekatan adalah 16% $((100\% - 20\%)/5)$.” sehingga dapat diperoleh kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.6
Interpretasi Skor

Hasil Persentase (%)	Kategori
20% - 35,99%	Tidak Dilaksanakan
36% - 51,99%	Sebagian Kecil Dilaksanakan
52% - 67,99%	Kadang-kadang Dilaksanakan
68% - 83,99%	Sebagian Besar Dilaksanakan
84% - 100%	Sudah Sepenuhnya Dilaksanakan

(Sugiyono, 2009)

Setelah data diperoleh dari lapangan maka akan dilakukan pengolahan data. Tahap-tahap yang dilakukan pada pengolahan data adalah mengumpulkan data dan memeriksa kelengkapan kuesioner yang telah diisi, melakukan tabulasi dari hasil kuesioner, dan melakukan analisis data dengan menggunakan analisis statistik untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis.

3.2.5.1 Uji Validitas

Setelah data dalam kuesioner didapat, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Menurut Sastradipoera (2005: 302) “validitas merupakan derajat hingga dimana ketepatan dan ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur gejala.” Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 keatas maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat (Sugiyono, 2005: 115). Sesuai dengan skala data yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini yang berskala ordinal, maka untuk melakukan uji validitas digunakan korelasi *Rank Spearman* dengan rumus:

$$\rho_{xy} = 1 - \frac{6\sum d^2}{N(N^2 - 1)}$$

Suliyanto (2011: 20)

Keterangan:

ρ_{xy} : koefisien korelasi Rank Spearman

6 : konstanta

$\sum d^2$: kuadrat selisih antar rangking dua variabel

N : jumlah pengamatan

3.2.5.2 Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Validitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian reliabilitas instrumen. Oleh karena

itu walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan.

“Keandalan (*reliability*) merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Uma Sekaran, 2006: 40). Untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* dengan rumusan sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Husein Umar (2008: 58)

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen
 k = banyak butir pertanyaan
 $\sum \sigma b^2$ = jumlah varian butir
 σt^2 = varian total

Semakin dekat *Alpha Cronbach* dengan 1 (satu), semakin tinggi keandalan konsistensi internal. “Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 adalah dapat diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik”(Uma Sekaran, 2006:182).

3.2.5.3 Transformasi Data

Mengingat bahwa data dihasilkan dalam skala ordinal, sedangkan analisis regresi mensyaratkan data berskala interval, maka sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dilakukan transformasi data skala ordinal menjadi skala interval yang menggunakan *Method Successive of Interval* (MSI) dengan langkah-langkah berikut:

Maria Novita Ari Sulisiana, 2014

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Pertama perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebarkan;
2. Pada setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disebut sebagai frekuensi;
3. Setiap frekuensi dibagi dengan dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi;
4. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor;
5. Gunakan tabel Distribusi Normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh;
6. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Densitas);
7. Hitung SV (*Scale Value*) atau nilai skala dengan rumus :

$$SV = \frac{\text{DensityOfLowerLimit} - \text{DensityAtUpperLimit}}{\text{AreaUnderUpperLimit} - \text{AreaUnderLowerLimit}}$$
8. Tentukan nilai tranformasi dengan rumus: $Y = NS + [1+|NS_{min}|]$

3.2.5.4 Uji Asumsi Klasik

Husein Umar (2003: 132) mengungkapkan bahwa dalam melakukan analisis regresi dan peramalan akan menggunakan data yang ditampung pada variabel bebas dan variabel tidak bebas serta dalam bentuk seri. Sebelum digunakan, data tersebut harus lolos uji sehingga terbebas dari masalah normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak (Husein Umar, 2009: 181). Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan rumus *one-sample Kolmogorov Smirnov Test*. Langkah-langkah *Kolmogorov-Smirnov Test* adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai *Kolmogorov-Smirnov* dengan rumus:

$$D = \frac{1,36}{\sqrt{n}}$$

Keterangan:

D = *Kolmogorov-Smirnov* hitung

n = Jumlah data

2. Menentukan *Kolmogorov-Smirnov* tabel (D_{tabel}) dengan derajat kepercayaan 95%.
3. Menarik kesimpulan berdasarkan kriteria berikut:

Jika $D_{hitung} \leq D_{tabel}$ maka data berdistribusi normal.

Jika $D_{hitung} \geq D_{tabel}$ maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedasitas, sementara itu, untuk varians yang berbeda disebut heteroskedasitas (Husien Umar, 2009: 179). Model

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dengan mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual memberikan signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi regresi linier adalah tidak terjadinya autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu (Husein Umar, 2009: 143). Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series). Untuk memeriksa adanya autokorelasi, biasanya memakai Uji Durbin-Watson:

$$DW = \frac{\sum(e_i - e_{i-1})^2}{\sum e_i}$$

Suliyanto (2011: 126)

Keterangan:

DW = nilai Durbin Watson

e = nilai residual

e_{t-1} = nilai residual satu periode sebelumnya

Suliyanto (2011: 126) mengungkapkan bahwa nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

DW	Kesimpulan
< dL	Ada autokorelasi (+)
dL s.d dU	Tanpa kesimpulan
dU s.d 4 – dU	Tidak ada autokorelasi
4 – dU s.d 4 – dL	Tanpa kesimpulan
>4 – dL	Ada autokorelasi (-)

3.2.5.5 Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sering digunakan sebagai salah satu alat analisis untuk membuat proyeksi. Hal ini didasari kenyataan bahwa nilai suatu variabel dapat dipengaruhi oleh satu atau lebih perubahan variabel lain. Dengan menggunakan analisis regresi maka akan diperoleh koefisien untuk setiap variabel bebasnya. Dengan diperolehnya koefisien regresi maka diharapkan akan dapat dibuat proyeksi atas besarnya nilai variabel tergantung yang mampu meminimumkan penyimpangannya.

Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung. Model yang digunakan untuk melakukan analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX + \varepsilon$$

(Suliyanto, 2011: 39)

Keterangan:

- Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- X = anggaran berbasis kinerja
- ε = nilai residu

Nilai a (konstansta) dan nilai b (koefisien regresi) dalam persamaan diatas dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

(Suliyanto, 2011: 39)

3.2.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

Sebelum menguji hipotesis alangkah baiknya kita menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya terlebih dahulu. Penetapan hipotesis penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) dinyatakan sebagai berikut:

$H_0: b \leq 0$, penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

$H_a: b > 0$, penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan fungsional atau kausal antara penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Hipotesis ini ditolak atau diterima dapat dilihat dari taraf signifikansi yang didapatkan setelah pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan *software SPSS 20.0 for windows*. Jika taraf signifikansi yang didapat lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya jika taraf signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.2.6.1 Koefisien Determinasi

Setelah melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hal ini muncul dari anggapan bahwa semakin tinggi derajat hubungan yang ada dikarenakan kuatnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Menurut Sudjana (2001 :368), rumus untuk koefisien determinasi:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan: KD = koefisien determinasi
 R^2 = koefisien korelasi yang dikuadratkan